

WACANA DAN GERAKAN PEREMPUAN ISLAM DI INDONESIA

Ilvi Nur Diana, MSi.

Penulis adalah Staf Pengajar Fakultas Ekonomi UIN Malang

ABSTRAK

Women's movement is one of important issues in the development of socio-intellectual discourse of Islam in Indonesia. Most figures emerge to encourage women in order that they pose higher positions and get involved in public area roles, beyond their traditional roles as housewives. In line with that opinion, effort has been taken to realize the arguments that women issues are only women's bussines. Does not belong to women only, but also men's. Those issues invited moslem scientist's attention to contribute intelectually for women's empowerment and their statuses in islamic tradition.

A. Pendahuluan

Bila ditelaah secara dalam dan obyektif, sejarah telah menyimpan catatan mengenai performa positif kaum perempuan yang melompati wilayah domestiknya. Namun karena alasan kodrati, perempuan sering disudutkan pada keadaan yang tidak menguntungkan, hal yang kerap kali menghilangkan kesempatan mereka untuk membuktikan kapasitas dan kapabilitas. Dan agamapun sering dijadikan alasan untuk melegitimasi atas diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan. Di Indonesia, isu perempuan terus bergulir sejalan dengan perubahan sosial-budaya masyarakat. Lantas seperti apa peran yang dilakoni perempuan dalam sejarah dan tradisi Islam, serta keIndonesiaan, dan bagaimanakah perhatian dan pandangan intelektual muslim Indonesia?

B. Kisah Perempuan dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an menggambarkan kisah-kisah perempuan dengan beragam detail dan kompleksitas yang berbeda-beda. Sebagian digambarkan dengan hanya sketsa kecil, sebagian yang lain digambarkan dengan porsi yang sangat besar. Secara keseluruhan, kisah-kisah perempuan menyajikan koleksi sejarah suci dan contoh paradigmatik yang kaya untuk dijadikan bahan kontemplasi.

Adam dan istrinya dibicarakan dengan maksud mengajarkan kepada manusia bahwa laki-laki dan perempuan adalah wakil yang bebas serta mempunyai kedudukan yang sama dalam memperjuangkan kebajikan dan melawan ketidakbenaran yang dalam cerita ini adalah setan, bukan seperti yang digambarkan oleh kebanyakan penafsir bahwa Hawa adalah sumber malapetaka dan kebohongan. Menurut Mohammad Abduh ¹, cerita Adam dan Hawa berlaku sebagai contoh peringatan dan petunjuk untuk mendefinisikan watak manusia dan misi manusia yang dikehendaki Allah SWT. Perintah Allah pada Adam dan Hawa tinggal di surga dan makan minum dengan bebas adalah simbol kebaikan, pohon larangan menimbulkan larangan tentang kejahatan. Kemudian Allah memberikan kemampuan berfikir kepada Adam dan Hawa dan hanya bisa menyimpang karena godaan syetan. Pengusiran dari surga merupakan penderitaan yang dialami manusia ketika membiarkan watak aslinya tersesat.

Kisah keluarga Madyan digambarkan sebagai keluarga yang anak perempuannya bekerja di luar wilayah domestik untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, yang mana pada zamannya di luar adat jika perempuan bertugas di wilayah publik. Namun mereka terus memperjuangkan nasibnya dengan berkompetisi dengan laki-laki, dalam keadaan tertindas sekalipun. Begitupun Kisah Asiyah istri Firaun, digambarkan sebagai perempuan pemberani, mandiri, berpendirian kuat dan orang yang menomersatukan pendidikan, bahkan ia berani melakukan perlawanan atas kedhaliman sekalipun kepada suaminya sendiri, hingga dirinya mampu mempertahankan keimanan dan kehormatannya.

Kisah Ratu Bilqis penguasa di negerinya digambarkan sebagai perempuan yang mempunyai kemampuan yang luar biasa dalam wilayah sosial politik, yang tidak akan tunduk kepada siapapun kecuali kepada kebenaran. Figur Maryam sebagai contoh perempuan yang ahli ibadah, bahkan Maryam disebut sebagai

¹ Barbara, Reinterpretasi Gender; Wanita dalam al-Quran, Hadits dan Tafsir, terj, Bandung, Pustaka Hidayah, 2001:86.

Ummul Siddiqin (QS:75) dan teladan bagi orang-orang yang beriman (QS:12), yang melakukan perlawanan terhadap budaya Yahudi pada saat itu, bahwa perempuan tidak boleh atau tidak pantas melakukan ritual ibadah di tempat ibadah (mihrab), karena tempat ibadah hanya milik laki-laki.²

Demikianlah perhatian al-Quran terhadap perempuan sesungguhnya lebih besar dari pada laki-laki, dua nama surat terkait langsung dengan perempuan, yaitu al-Nisa' dan al-Mujadalah. Ayat-ayat yang terkait dengan perempuan, istri, dan ibu tidak kurang dari dari 214 ayat, dan yang terkait dengan laki-laki, suami dan bapak sebanyak 170 ayat.³

Selain peran utamanya melahirkan yang tidak dapat digantikan oleh laki-laki, perempuan juga mempunyai peran penting di tengah-tengah masyarakat. Menurut Benazir Butto⁴ legalitas perempuan dalam Islam sejauh menyangkut persoalan kesempatan, yang hal ini merujuk surat Yasin (34-35) bahwa laki-laki dan perempuan diberi kesempatan yang sama untuk berperan dan mendapatkan manfaat akan sumber daya alam. Gambaran al-Quran yang ramah perempuan inilah yang banyak mewarnai wacana dan gerakan perempuan.

C. Peran Perempuan pada masa Rasulullah

Rasulullah mengajarkan kemandirian bagi perempuan untuk mempunyai keterampilan, istri pertamanya yakni Siti Khodijah dikenal sebagai pebisnis yang handal dan konglomerat yang sukses pada zamannya. Ia dikenal sebagai wanita mandiri, ulet berkepribadian tinggi dan mempunyai kepekaan sosial. Setelah menikah, ia pun ikut andil berjuang bahkan tidak segan-segan mendanai misi Rasulullah, dan selalu mendampingi beliau dalam keadaan apapun, memberikan inspirasi dan solusi yang harus dilakukan Rasulullah.

Dalam perkembangannya, Rasulullah selalu mengajak perempuan di berbagai peperangan untuk ikut berperan, baik sebagai ahli medis, tentara dan lain sebagainya. Seperti halnya dalam kitab *Thobaqat*-nya Ibnu Saad dijelaskan bahwa banyak perempuan yang mati syahid dalam peperangan, misalnya Ummu Imarah binti Ka'ab yang mati syahid bersama suaminya dalam peperangan Uhud, ia

² Ibid, hlm.153

³ Chairil Anwar, *Ikut mendiskusikan Soal Pemimpin Perempuan: Serahkan Pemilu sebagai Media Kompromi*, Jawa Pos, 4/12/1998.

⁴ Saïd al-afghani, *Pemimpin Wanita di Kancah Politik: Sejarah pemerintahan Aisyah*, terj. Surabaya, Pustaka Pelajar, tth.hlm.ix

bertempur dan luka sebanyak 12 tusukan tombak. Ini menunjukkan bahwa gerakan perempuan untuk berjuang dalam segala kehidupan sangat didukung Rasulullah.

Aisyah pun sering ikut dalam peperangan bersama Rasulullah, disamping ia dikenal sebagai ulama', ahli hukum, cendekiawan, sejarawan, budayawan, dan politisi. Rumahnya sebagai pusat informasi, selalu didatangi baik untuk belajar maupun untuk meminta fatwa, meminta perlindungan ataupun sekedar ingin berdiskusi. Pada masa Abu Bakar dan Umar, Aisyah masih belum banyak berkiprah di dunia politik, karena kedua kholifah tersebut mampu menegakkan demokrasi sosial politik, baru pada masa Usman bin Affan, ia menempatkan dirinya sebagai *agent of controll* atau bahkan oposisi, karena tindakan atau kebijakan-kebijakan Usman sering dianggap tidak adil, sekalipun hubungan pribadi Usman dengan Aisyah sangat baik semenjak masa Rasulullah. Namun demikian, ia menentang cara kekerasan untuk menjatuhkan Khalifah Utsman, oleh sebab itu ia terus menuntut Ali bin Abi Thalib untuk melacak pelaku pembunuhan Usman bin Affan.⁵

Khafsa juga terkenal sebagai intelek, ia terlibat dalam kegiatan sosial politik bersama Aisyah. Begitu juga Ummu Salamah sangat pemberani dan kritis. Ketika Nabi menghadapi situasi kritis ketika umat Islam kecewa dengan perjanjian Hudaibiyah tidak mau bertahallul, ia tampil memberi saran yang argumentatif kepada Nabi agar bersikap tegas dan mulai bertahallul, yang kemudian sarannya itu diikuti oleh nabi dan sahabat lain, dan masih banyak lagi perempuan pada masa Nabi yang patut dijadikan model pergerakan perempuan Islam.

Citra-citra modern perempuan pada masa lalu ini muncul disebabkan oleh kebutuhan setiap generasi pada masanya. Dan semua itu menunjukkan perubahan paradigmatik tentang persoalan-persoalan ajaran dan etika, yang kini di era modern mendominasi wacana dan gerakan perempuan, khususnya yang berkaitan dengan perubahan sosial politik dan budaya.

D. Perempuan di Indonesia

1. Modernisasi dan Perubahan Sosial

⁵ Ibid.hlm.6.

Sejak beberapa abad yang lalu sebenarnya perempuan Indonesia sudah mempunyai peran strategis dalam masyarakat. Pada abad 14 ada tiga kerajaan Islam yang dipimpin perempuan, yaitu Sultanah Khodijah, Sultanah Maryam dan Sultanah Fatimah, tapi sayang harus menyerahkan kekuasaannya kepada laki-laki karena fataw Qodli Makah yang melarang kepemimpinan perempuan. Pada zaman Majapahit, sejarah mencatat pula ratu Tribuana Tungga Dewi (1328) yang kemudian melahirkan raja Majapahit Hayam Wuruk. Sejarah juga mengisahkan Aceh pernah dipimpin seorang perempuan Sultanah Seri Ratu Tajul Alam Safiatuddin Johan. Ia dinobatkan sebagai raja Aceh sejak tahun 1641-1699. Di Sulawesi Selatan, Siti Aisyah We Tenriolle menjadi ratu Tanette tahun 1856. Di Kutai pernah pula berkuasa seorang ratu, yaitu Ratu Aji Sitti.

Pada masa perjuangan, ketika bangsa ini tengah berjuang dengan senjata melawan penjajah, tidak asing di telinga kita nama-nama pejuang perempuan. Sejumlah pahlawan perempuan seperti Raden Ayu Ageng Serang, Tjut Nya' Dien yang tetap tegar memimpin perlawanan mengusir penjajah meski dibelit penyakit dan kebutaan, begitu pula dengan Tjut Meutia, Laksamana Malahayati, semuanya memimpin laki-laki dalam peperangan di Aceh. Mereka ikut andil dalam mengatur strategi dan taktik sekaligus ikut mengangkat senjata dalam berbagai peperangan.

Selanjutnya, awal abad ke-20 merupakan satu periode penting dalam sejarah Indonesia, termasuk dalam gerakan perempuan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah kolonial dengan politik etisnya, terutama melalui institusi pendidikan modern, telah menciptakan masyarakat baru yang akrab dengan modernitas, masyarakat kelas menengah di perkotaan kemudian tampil dengan terma-terma baru yang mengekspresikan hasrat kemajuan. Perubahan mendasar terjadi hampir di semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk perubahan sosial politik dan keagamaan, serta gerakan kaum perempuan.⁶

Begitupun dengan perempuan seperti Kartini yang gigih memperjuangkan emansipasi dalam arti pembebasan diri melawan adat, kekolotan dan keterbelakangan, sehingga ia memelopori emansipasi perempuan. Ia menjadi saksi munculnya sebuah kesadaran baru di kalangan perempuan Indonesia, dan ia pun menjadi simbol awal gerakan emansipasi perempuan. Baginya, masalah pokok

⁶ Jajat Burhanudin dan Oman Fathurahman, Ed. *Tentang Perempuan Islam, Wacana dan Gerakan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm.6.

yang dihadapi bangsa Indonesia adalah pendidikan. Pendidikan bukan hanya ditujukan pada kaum laki-laki tetapi pendidikan bagi kaum perempuan juga perlu mendapat prioritas, suatu pemikiran yang cukup berani pada zamannya.

2. Pemikiran dan Gerakan Perempuan Di Indonesia

Tumbuhnya gerakan perempuan di Indonesia di samping dipengaruhi oleh perubahan sosial-budaya juga berkaitan erat dengan gerakan pembaharuan Islam yang berlangsung pada awal abad ke-20. Kebijakan politik balas jasa kolonial telah melahirkan masyarakat muslim baru yang sangat akrab dengan pranata sosial budaya dan pemikiran modern, yang kemudian tampil menjadi aktor utama dalam pembaharuan Islam. Keeratan hubungan tersebut dapat dilihat misalnya dengan lahirnya karya sastra bernafaskan Islam yang berjudul *Hikayat Faridah Hanum* yang ditulis syekh al-Hadi.

Karya tersebut memberi corak baru pada penafsiran keagamaan tentang hak perempuan dalam menentukan jalan hidupnya termasuk dalam perkawinan. Inti dari karya tersebut bahwa seorang wali tidak boleh memaksa putrinya menikah dengan orang lain, karena akan mengakibatkan penderitaan seperti yang dialami tokoh Faridah Hanum, yang akhirnya ia harus menentukan sendiri pilihan hidupnya. Dalam karya tersebut juga dihadirkan tokoh mufti dari Mesir Muhammad Abduh yang mendukung sikap Faridah Hanum.⁷

Selain itu, syekh al-Hadi juga menerbitkan jurnal pembaharuan Islam, *al-Imam* pada tahun 1906. Jurnal tersebut mencatat lima point dalam kerangka gerakan untuk kemajuan perempuan, yaitu pengakuan hak dan status perempuan di tengah masyarakat, memberi aturan posisi sosial perempuan, memberi perlindungan, mengatur dan mengontrol praktik poligami dan menciptakan kesadaran diri kaum perempuan. Ini menunjukkan bahwa gerakan untuk kemajuan perempuan menjadi suatu yang tak terpisahkan dari pembaharuan pemikiran Islam.

Dalam hal pendidikan, muncul seorang tokoh perempuan dari Sumatra Rohana Kudus Adik Sultan Sahrir. Ia mendirikan sekolah *Kerajinan Perempuan* tahun 1911. Sekolah tersebut dirancang untuk memberikan pengetahuan keagamaan termasuk baca tulis Arab, dan juga keterampilan agar perempuan mandiri secara ekonomi. Pada tahun 1912, ia menerbitkan surat kabar

⁷ Ibid, hlm.16.

perempuan *Soenting Melayu* yang artinya perempuan Melayu. Surat kabar tersebut memberi kontribusi yang amat berarti dalam sejarah gerakan perempuan Indonesia dan makin memperkuat laju perkembangan wacana kemajuan perempuan. Dalam waktu yang bersamaan, di Medan terbit surat kabar *Perempuan Bergerak* untuk mendukung sosialisasi dan advokasi gagasan kemajuan perempuan. Di Jawa juga terbit *Wanita Sworo* yang dipelopori Siti Soendari adik dr.Sutomo pada tahun 1912.

Berbeda dengan Rohana Kudus dan Rangkojo Rasuna Said yang juga mengajarkan politik kepada murid-muridnya, Rahmah el-Yunusiah⁸ mementingkan pendidikan agama di atas segala-galanya. Ia mendirikan Diniyah School Putri pada tahun 1923. Perjuangan Rahmah ini tidak dapat dipisahkan dari gerakan pembaharuan Islam di Sumatra Barat pada khususnya. Ia mengadopsi sistem pendidikan modern kolonial yang kemudian diberi ciri khusus keislaman. Pendidikan kaum perempuan menjadi orientasi utama bagi perjuangannya. Tokoh lain adalah Dewi Sartika, dan Nyai Ahmad Dahlan, yang juga berkecimpung dalam bidang pendidikan dan sosial keagamaan. Begitu pun dengan tokoh lain berikutnya seperti Maftuhah Yunus, ia menjadi satu-satunya guru perempuan yang mengajar di HIS Salatiga pada tahun 1938.⁹

Di dunia jurnalis muncul Hj. Siti Latifah Herawati Diah. Ia menerobos banyak hal, termasuk sekolah ke Jepang ketika kebanyakan putra Indonesia harus sekolah ke negeri penjajahnya yakni Belanda. Pada masa pemerintahan Jepang berkuasa, ia tidak mau melanjutkan studinya ke Jepang, karenanya ia hijrah ke New York. Sepulang dari Amerika ia terus mengembangkan kariernya. Tetapi sayang, ia tidak mempunyai pilihan selain menjadi penyiar radio militer Jepang, suatu hal yang jauh dari idealismenya. Ketika Indonesia merdeka ia menjadi *public officer* di DEPLU yang bertugas memberikan penerangan kepada pers asing yang membutuhkan informasi dalam negeri. Sampai kemudian menjadi pemimpin redaksi berbagai majalah sejak 1950-an.¹⁰

Pada tahun 1951 ada kemajuan besar dalam wacana dan gerakan perempuan Islam di Indonesia, yaitu diperbolehkannya perempuan menjadi

⁸ Jajat Burhanudin,Edt *Ulama Perempuan Indonesia*,. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2002, hlm.1.

⁹ Maftuchah Yunus, *Perempuan Agama dan Pembangunan; Wacana Kritis atas Peran dan Kepemimpinan Wanita*, Yogyakarta, Lembaga Studi dan Inovasi Pendidikan,2000, hlm.180.

¹⁰ Martha Thilaar, *Leadership Quotiont;Perempuan Pemimpin Indonesia*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2003, hlm. 89.

hakim. Pada saat itu, menteri Agama A. Wahid Hasyim memberi hak untuk menjadi hakim agama kepada perempuan. Namun demikian, bukan berarti perjuangan perempuan telah usai, bahkan perjuangan untuk meningkatkan potensi perempuan dan penyebaran kesadaran akan kemampuan mereka, masih harus diperjuangkan lebih gigih lagi.

Dalam konteks sejarah Indonesia, wacana dan gerakan perempuan tersebut barangkali dapat disebut sebagai gelombang pertama gerakan perempuan. Kemajuan yang menjadi dasar pergerakan Indonesia secara umum, menjadi satu ciri utama gerakan perempuan yang kemudian diterjemahkan dalam rumusan *emansipasi*. Selanjutnya isu perempuan menarik perhatian sejumlah intelektual muslim Indonesia. Pemikiran-pemikrannya dapat dikatakan babak baru dalam perkembangan wacana dan gerakan perempuan, yang sering mendatangkan perdebatan.

3. Perkembangan Organisasi Perempuan

Gerakan perjuangan perempuan sebagai gerakan kebangsaan dan sosial tidak muncul secara tiba-tiba melainkan merupakan perkembangan dalam masyarakat, yang mana ada perasaan cemas dan keinginan individu yang menghendaki perubahan dengan bergabung menjadi satu kekuatan besar. Sejak berdirinya Budi Utomo 1908 yang kemudian menjadi tonggak kebangkitan, sejumlah perempuan intelektual Indonesia memprakarsai berdirinya pergerakan-pergerakan atau organisasi-organisasi perempuan. Organisasi-organisasi tersebut antara lain Putri Mardika yang didirikan atas bantuan Budi Utomo tahun 1912 di Jakarta. Perkumpulan ini bertujuan agar perempuan mempunyai sikap yang tegas dan tidak malu-malu. Perkumpulan lainnya adalah Kautamaan Istri yang bertujuan mengadakan rumah sekolah bagi anak-anak perempuan sejak tahun 1913 di Tasikmalaya, dan terus berkembang di tanah Pasundan sampai tahun 1917 dengan pengajarnya adalah Dewi Sartika.

Pada tahun 1912 berdiri perkumpulan yang bersifat keagamaan dengan nama Sopa Trisno di Yogyakarta yang diprakarsai Nyai Ahmad Dahlan, yang kemudian menjadi cikal bakal perkumpulan wanita Muhammadiyah dengan nama Aisyiah. Menurutnya, pendidikan merupakan prasyarat utama bagi peningkatan derajat perempuan. Bahkan menurutnya, ajaran Islam yang begitu memuliakan kaum perempuan telah mengalami distorsi, sehingga kerap berada di luar inti

ajaran Islam.¹¹ Pola yang sama juga dapat dilihat di kalangan perempuan anggota Nahdlotul Ulama yang berdiri pada tahun 1926, kemudian mereka membentuk organisasi Muslimat NU. Begitu pula dengan Wanodya Utomo dari SI, dan Muhammedaansche Vrouwen Vereeninging.

Pada tahun 1928 maka dirasa perlu oleh perkumpulan-perkumpulan organisasi perempuan untuk mengadakan kongres Perempuan Indonesia pertama di Yogyakarta. Adapun tujuan dari kongres adalah untuk mempersatukan cita-cita memajukan perempuan Indonesia. Hasil yang dicapai adalah terbentuknya federasi atau gabungan perkumpulan perempuan yang bernama Perikatan Perempuan Indonesia (PPI). PPI beralih nama menjadi PPII (Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia) pada tahun 1929. Pembentukan federasi tersebut mengundang kritik dari sejumlah organisasi perempuan. Mereka menilai bahwa PPII tidak lebih dari dari istri kaum bangsawan yang sekedar kumpul-kumpul, karena hanya terfokus pada masalah domestik.

Kongres Perempuan Indonesia II diadakan di Jakarta tahun 1935. kongres ini membicarakan tentang perburuhan perempuan, pemberantasan buta huruf dan perkawinan, selanjutnya diputuskan tiga tahun sekali diadakan kongres Perempuan Indonesia (KPI). Pada tanggal 23-28 Juli 1938 diadakan kongres III, yang memutuskan tanggal 22 Desember menjadi hari ibu dengan harapan peringatan tersebut menambah kesadaran kaum perempuan akan kewajibannya sebagai ibu bangsa. Kongres ini juga membicarakan masalah politik, yaitu tentang hak pilih perempuan.¹²

4. Memasuki Alam Perdebatan

Pada dekade 1930-an mulai muncul pertentangan ideologi dalam wacana perempuan. Gagasan kemajuan perempuan yang menjadi tema sentral pada awal abad ke-20, mulai mengalami pergeseran atau pengkayaan strategi dan perspektif yang kerap menimbulkan pertentangan satu sama lain di kalangan organisasi perempuan.

¹¹ Lihat Jajat dan Oman, hlm.21; Nyai Ahmad Dahlan berpendapat “ pandangan Islam yang menjamin kedudukan sama antara perempuan dan laki-laki diabaikan. Ajaran al-Quran yang memberi bimbingan tentang bagaimana sebenarnya perempuan harus bertingkah laku di rumah dan dalam masyarakat, disingkirkan dan telah menjadi kata-kata mati belaka”.

¹² I Wayan Badrika, *Sejarah Nasional Indonesia dan Umum*, Jakarta, Erlangga, 2002.

Salah satu isu penting yang selalu menjadi perdebatan panjang adalah masalah poligami. Dalam hal ini ada dua kelompok, yaitu kelompok radikal yang tidak mau kompromi dengan kaum agama dan kelompok kedua mereka yang dapat berkompromi dengan agama sehingga poligami merupakan ajaran Islam yang harus ditaati, namun tidak berarti mereka menyetujui praktik poligami dilakukan sekehendaknya. Dalam kongres Muhammadiyah tahun 1930 di Bukittinggi pun, perempuan Aisyiyah tetap membela poligami sebagai ajaran agama. Pertentangan ini memuncak sampai pada kongres IV tahun 1933, Adapun dari Jong Islamieten Bond (JIB) Yusuf Wibisono berpendapat bahwa menentang poligami berarti melanggar etika perkawinan dalam Islam. Dan sejak saat itu diskusi tentang Islam dan perempuan terus berkembang secara intensif.

Selanjutnya wacana tentang perempuan didominasi pemikiran Sukarno yang mengangkat isu perempuan dalam agenda makro perubahan sosial dan politik. Keterlibatan Sukarno sebenarnya dimulai sejak kongres perempuan ke-1, 1928. ia mengetengahkan pentingnya dimensi politik dalam gerakan perempuan. Ia ingin melepaskan gerakan perempuan dari koridor sempit feminisme dan emansipasi dan menarik ke dalam gerakan kemerdekaan Indonesia.

Pada tahun 1947 ia menerbitkan buku tentang perempuan yang berjudul *Sarinah*. Dalam buku ini, Pemikirannya mengalami pergeseran, yaitu hanya melihat masalah perempuan dari sekedar isu perjuangan kemerdekaan. Gerakan perempuan harus memasuki gerakan sosialisme yang bertujuan menciptakan dunia baru, yang mana perempuan dan laki-laki harus bersama-sama bahu membahu mendatangkan masyarakat sosialis, yang sama-sama sejahtera. Hanya sosialis yang dapat menolong nasib kaum perempuan.¹³ Dari pemikiran-pemikirannya lahir organisasi perempuan yang bernama Gerwani pada tahun 1954.

Berbeda dengan pemikiran Sukarno yang diwarnai ajaran marxis-sosialis, kelompok muslim tampil mengetengahkan pemikirannya tentang perempuan. Sebut saja Munawar Chalil dari Persis, ia memberikan pandangan tandingan yang berangkat dari nilai-nilai Islam terhadap kecenderungan “kiri”. Memang, ciri dari konflik yang terjadi pada dekade 50-an adalah berbagai pemikiran ideologi. Periode ini diwarnai bukan hanya oleh system pemerintahan yang berubah secara

¹³ Sukarno, *Sarinah ; Kewajiban wanita dalam Perdjoengan RI*, Yogyakarta, panitia Penerbit Buku-buku karangan Presiden Sukarno, 1963, hlm.158

berulang-ulang, tetapi juga perdebatan ideologis seputar dasar Negara Indonesia, yang hal ini juga terefleksikan dalam wacana tentang perempuan.

Menurut Munawar Chalil, pemikiran ideologi non Islam telah berjasa besar dalam melahirkan sikap dan pandangan yang sesat tentang perempuan. Oleh karena itu harus kembali pada ajaran Islam, bahwa laki-laki dan perempuan memang berbeda, perempuan bukan binatang, tidak untuk dihina ataupun didewakan. Ia kemudian mengidentifikasi tiga periode pemikiran tentang perempuan, yaitu periode pertama diwarnai pemikiran yang menghinakan dan mendiskreditkan perempuan. Periode kedua, disebut mendewakan perempuan, yang mana perempuan dipuja dan pada saat yang sama hanya difungsikan memuaskan hawa nafsu laki-laki. Periode ketiga disebut menyamaratakan, yaitu laki-laki dan perempuan dipersamakan seratus persen, bebas dari semua ikatan. Kemudian ia merumuskan sebuah pemikiran yang berdiri di antara ketiganya, yaitu tidak menghinakan, tidak mendewakan dan tidak menyamaratakan. Karena menurutnya, perempuan memang diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, sehingga kodrat perempuan lebih lemah dari laki-laki.

Pandangan Munawar Chalil tersebut berimplikasi pada sektor lain, yaitu pada peran perempuan. Menurutnya peran perempuan adalah sebagai puteri, istri, dan ibu. Kelemahan perempuan adalah fitrah dan kodrat. Hal ini ditanggapi oleh Hamka dengan sangat moderat. Ia tidak menyalahkan kaum muslim yang mempunyai pendapat bahwa perempuan memang lebih lemah dari laki-laki. Menurutnya, pemahaman tentang asal-usul perempuan tersebut berasal dari “Perjanjian Lama” sehingga mempengaruhi penafsiran pada teks agama. Begitu juga dengan Hasbi as-Siddiqi, ia menilai pandangan kaum muslim sangat tidak menguntungkan perempuan, hal ini disebabkan adanya teologi “tulang rusuk”. Sebenarnya, ketertinggalan perempuan bukan karena ia lebih lemah, tetapi hanya masalah kesempatan yang tidak dapat diakses. Keterlibatan perempuan merupakan hak yang tidak boleh dinafikan. Hasbi mengambil banyak contoh tokoh perempuan yang berada di wilayah publik seperti Ummu Atiyah dan Ummu Sinan.¹⁴

Pada perkembangan selanjutnya, marak tuntutan diadakannya UU Perkawinan, yang kemudian dibentuk komisi perkawinan yang menghasilkan rancangan bahwa poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat yang amat ketat.

¹⁴ Loc.cit., *Tentang Perempuan Islam, Wacana dan Gerakan*, hlm.

Namun secara mengejutkan pemerintah mengeluarkan keputusan No. 19/1952 yang salah satu isinya adalah memberi tunjangan dua kali lipat bagi pensiunan yang beristri dua. Tentu saja hal ini mendapat protes dari organisasi perempuan yang kemudian demonstrasi, dan yang menarik, tidak ada satu pun organisasi perempuan Islam yang ikut serta. Bagi organisasi perempuan Islam, poligami jelas boleh dengan syarat tertentu, sementara organisasi lain menolak dengan tegas. Sementara itu, Hamka merespon sangat hati-hati, menurutnya yang terbaik adalah monogami, poligami memang lebih aman dibanding mengawini perempuan yatim dengan tujuan mengambil hartanya, itu pun dengan syarat yang amat ketat.

Dengan demikian, gerakan perempuan Indonesia telah memasuki satu tahap perkembangan dimana perdebatan dan pertentangan baik menyangkut strategi ataupun ideologi, tampil menjadi satu ciri yang menonjol. Hal ini tumbuh seiring dengan munculnya berbagai corak ideologi dalam pentas pergerakan sosial dan politik di Indonesia. Kondisi semacam ini menciptakan suasana tertentu bagi kalangan muslim untuk makin intens merumuskan gerakan perempuan dalam terma-terma Islam. Orientasi dan pemikiran bukan bagaimana memajukan perempuan, tetapi merumuskan kembali kemajuan perempuan agar tidak melampaui batas-batas agama.

5. Masa Orde Baru

Pemerintah Orde Baru mempunyai agenda penting, yaitu pemberlakuan kebijakan politik dan ekonomi yang berorientasi pada pembangunan untuk menggantikan kebijakan orde lama yang menekankan pembangunan ideologi dan politik. programnya berorientasi persoalan praktis yang berkaitan dengan kebutuhan hidup masyarakat. Kaum perempuan ditempatkan sebagai partner manis bagi pembangunan, karena perempuan dianggap sebagai sumber daya pembangunan. Ini terlihat pada *blue print* pembangunan sebagaimana termaktub dalam GBHN, bahwa “wanita memiliki hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk ikut serta dalam segala kegiatan pembangunan”.

Contoh kebijakan pemerintah Orde Baru adalah dibentuknya kementerian khusus urusan wanita, dharma wanita yang dipegang langsung oleh presiden dan wakil presiden sebagai pembina utama dengan istrinya sebagai penasihat utama dan PKK yang menjadi proyek Menteri Dalam Negeri. Secara umum, kelahiran kedua organisasi tersebut tidak terlepas dari situasi sosial politik, sedangkan

kepengurusannya berdasarkan jabatan struktural sang suami di pemerintahan, bukan karena intelektual dan kapabilitas seorang perempuan itu sendiri. Otonomi individu perempuan dalam menentukan nasib dirinya diabaikan dan kemudian secara berbarengan disubordinasikan untuk mendukung penuh kepentingan suami.

Adapun wacana tentang perempuan di kalangan intelektual muslim yang berkembang pada saat itu juga berada dalam kerangka ideologi pembangunan. Hal ini dipengaruhi oleh rumusan pemikiran Islam pada saat itu yang berorientasi pada pembangunan. Oleh karena itu baik pemikiran maupun aktivitas sejumlah tokoh intelektual perempuan muslim Indonesia diarahkan untuk mendukung program pembangunan. Sebut saja misalnya Zakiyah Derajat, pemikiran dan praktik sosial keagamaan yang dikembangkan berada dalam koridor kebijakan pemerintah orde baru, termasuk masalah perempuan. Ia terlibat membidani lahirnya lembaga untuk perempuan di lingkungan Depag, yaitu Perwanida (Persatuan Wanita Departemen Agama). Seperti halnya Dharma Wanita, Perwanida memberi kursus-kursus pada istri-istri pegawai agar dapat berperan sebagai pendamping suami yang baik. Dengan demikian politik gender pemerintah Orde Baru telah memberdayakan perempuan bahkan melanggengkan perempuan tetap pada ranah domestik.

Selain Zakiyah Derajat, nama-nama seperti Suryani Tahir dan Tuty Alawiyah¹⁵ yang merintis majlis taklim juga dapat dikatakan mewakili satu gerakan perempuan masa Orde Baru. Majlis taklim tersebut kemudian berkembang menjadi satu bentuk gerakan sosial keagamaan perempuan dalam kerangka ideologi orde baru. Tema-tema yang diusung di dalamnya juga meliputi isu penguatan peran domestik perempuan.

Masih berkaitan dengan wacana dan gerakan perempuan yang berorientasi pembangunan, yang perlu dicatat adalah fatwa MUI yang mendukung program pemerintah berkaitan dengan hak-hak reproduksi perempuan tepatnya keluarga berencana (KB), melalui muktamar nasional ulama tentang kependudukan, kesehatan dan pembangunan pada tahun 1983. Fatwa tersebut mendapat dukungan dari sejumlah organisasi perempuan, seperti Muslimat NU dan Aisiyah.

Pada perkembangan selanjutnya, terjadi pergeseran isu dan orientasi gerakan perempuan, kalau masa sebelumnya gerakan perempuan masih pada koridor emansipasi, pada dekade 1990-an mulai berada dalam kerangka ideologi feminisme yang menekankan kesetaraan gender. Meskipun tidak semua umat

¹⁵ Loc.Cit Jajat, Ulama Perempuan Indonesia, hlm.197-227

Islam dapat menerimanya, wacana Islam dan peran perempuan menjadi penting. Wacana feminisme di Indonesia tidak hanya didominasi pandangan feminisme sekuler, tetapi juga feminisme Islam. Dalam konteks inilah kemunculan aktivis perempuan muslim Indonesia menjadi penting. Begitu juga dengan orientasi gerakan tidak hanya diarahkan menciptakan kemajuan perempuan tetapi sudah menyentuh upaya perubahan sosial politik dan budaya secara mendasar.

6. Masa Reformasi

Pada era reformasi ini, wacana Islam tentang perempuan masih terus menjadi perdebatan, dan banyak diwarnai isu politik. Fiqh masih sangat potensial menjadi panglima, padahal dalam fiqih senantiasa terdapat sejumlah pandangan ulama yang kadang bertentangan satu sama lain, dan sangat tergantung pada siapa yang mendefinisikan. Begitu pula dengan wacana kepemimpinan perempuan. Pada tahun 1997, Munas NU di Lombok mengeluarkan fatwa bahwa perempuan dapat berkiprah di ranah publik dan berperan aktif dalam berpolitik. Pada tahun 1999, fatwa itu semacam dianulir oleh munas alim ulama MUI bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin.

Sementara itu tokoh Muhammadiyah Amin Rais juga tidak mendukung kepemimpinan perempuan. Ia mengatakan bahwa jika masih ada laki-laki yang becus tidak akan memilih perempuan. Senada dengan Amin Rais, Hamzah Haz berpandangan bahwa penduduk Indonesia mayoritas Islam, karenanya perempuan dilarang menjadi presiden. Ketika Megawati menjadi presiden, Hamzah Haz pun beralih pandangan bahwa Indonesia bukan Negara Islam karena itu tidak ada larangan perempuan menjadi pemimpin.

Demikian sebaliknya, kelompok yang memperjuangkan perempuan juga bergelanyut pada fiqh, seperti Musdah Mulia yang mengkritisi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Counter Legal Draft KHI nya, melalui pendekatan gender analisis. Draft tersebut kemudian mendapat tentangan keras dari berbagai kalangan, termasuk MENAG yang membatalkannya. Beragam reaksi bermunculan, banyak kalangan yang mempermasalahkan draf KHI, terutama pada hukum perkawinan. CLD KHI dianggap telah membengkokkan dalil-dalil yang ada dalam al-Quran dan Hadits.

Perjuangan perempuan masih terus berlanjut untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan gender, termasuk kuota 30% pun merupakan hasil

perjuangan perempuan yang cukup panjang dan sangat melelahkan, dan juga UU KDRT No 23/2004, yang memberi peluang untuk dapat menciptakan hukum yang lebih adil khususnya bagi perempuan, karena pasal-pasal yang ada dalam UU ini secara keseluruhan mengedepankan pola relasi kemanusiaan dan kebersamaan antara suami istri, bahwa suami istri tidak boleh saling menyakiti dan melakukan tindak kekerasan baik fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga, agar terwujud keluarga yang sakinah.

Selanjutnya muncul RUU anti pornografi dan pornoaksi yang sampai kini masih kontroversial, banyak kalangan bahkan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, serta LSM perempuan yang menentang sekaligus mendukung. Terlepas dari kontroversi itu, pornografi memang dilarang dalam Islam, namun RUU APP tersebut memang masih multitafsir, karenanya perlu diperjelas dan dikaji lebih mendalam dengan tidak mengabaikan fakta bahwa perempuan seringkali menjadi korban, sehingga nantinya akan lahir UU yang secara substansi memperhatikan aspek perlindungan terhadap kaum perempuan.

E. Penutup

Agaknya dapat dikatakan bahwa awal abad 20 merupakan abad fase dasar perjuangan hak-hak perempuan Indonesia. Perempuan intelektual pada masa itu pada umumnya berasal dari keluarga ningrat, karenanya yang menjadi perhatian utama adalah pendidikan bagi kaumnya dan perjuangan perkawinan monogami. Kiranya, kini gerakan perempuan di Indonesia sudah seharusnya memperjuangkan bagaimana perempuan menjadi pemimpin, atau *how to be a leader*. Ini harus disosialisasikan tidak hanya berbentuk penyadaran terhadap kaum perempuan semata, tapi juga mengarah pada penyadaran kritis kaum laki-laki. Memang, mendobrak budaya patriarkhis yang sedemikian kuat bahkan mendarah daging, tidaklah semudah membalik telapak tangan, tetapi diperlukan berbagai upaya simultan agar lebih menyentuh pada persoalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Chairil Anwar, *Ikut mendiskusikan Soal Pemimpin Perempuan: Serahkan Pemilu sebagai Media Kompromi*, Jawa Pos, 4/12/1998.
- Barbara, *Reinterpretasi Gender; Wanita dalam al-Quran, Hadits dan Tafsir*, terj, Bandung, Pustaka Hidayah, 2001
- Jajat Burhanudin, Edt *Ulama Perempuan Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Jajat Burhanudin dan Oman Fathurahman, Ed. *Tentang Perempuan Islam, Wacana dan Gerakan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- I Wayan Badrika, *Sejarah Nasional Indonesia dan Umum*, Jakarta, Erlangga, 2002.
- Maftuchah Yunus, *Perempuan Agama dan Pembangunan; Wacana Kritis atas Peran dan Kepemimpinan Wanita*, Yogyakarta, Lembaga Studi dan Inovasi Pendidikan, 2000.
- Martha Thilaar, *Leadership Quotion; Perempuan Pemimpin Indonesia*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2003.
- Said al-afghani, *Pemimpin Wanita di Kancah Politik: Sejarah pemerintahan Aisyah*, terj. Surabaya, Pustaka Pelajar, tth.